

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.

Pengadilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi, finansial, dan administrasi berada di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat militer di lingkungan TNI. Setelah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (*One roof system*) sesuai UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka secara yuridis terdapat perubahan dibidang organisasi, administrasi dan keuangan yang semula berdasarkan Keputusan Pangab Nomor: Kep.01/P/I/1984 tanggal 27 Januari 1984 berada di lingkungan Mabes TNI, maka beralih ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tersebut, maka mengenai Binpers Militer di lingkungan Peradilan Militer sampai saat ini masih berada di bawah Mabes TNI sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada pada lingkungan Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan Pasal 45b secara otomatis beralih menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Mahkamah Agung. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Surat Keputusan Bersama Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/5/VIII/2004. Saat ini organisasi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian kota serta kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

Peta Dislokasi Wilayah Hukum Dilmil II-11 Yogyakarta



Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Militer menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya yaitu prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
2. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi dan Grasi serta Peninjauan Kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

B. VISI DAN MISI

Di dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sebagai puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi yang dimaksud

adalah **Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang Agung** (*Court of Excellence*). Oleh karena itu di dalam upaya mencapai visinya tersebut melalui misi yang telah ditetapkan yang meliputi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan, profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menentukan rencana strategis sebagai berikut:

1. Tujuan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi dan perbaikan kinerja aparatur pemerintah/Negara.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode 2021-2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan;
- c. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakkan hukum yang tegas dengan skala prioritas kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat;
- d. Terciptanya budaya hukum dan profesionalisme di kalangan aparatur hukum dalam rangka penegakan, pelayanan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hukum; dan

e. Tersedianya/terpenuhi infrastruktur dan suprastruktur guna mendukung pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan, akuntabel serta kapabel dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang adil kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Sasaran

Hasil (*result*) atau sasaran yang diharapkan dan ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam hal ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2021-2024) adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan aksebilitas putusan hakim;
- c. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (TI);
- d. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan;
- e. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
- f. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; dan
- g. Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja.

3. Kebijakan dan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan Renstra tahun 2021-2024 yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
- e. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- f. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan; dan
- g. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Penetapan tujuan dari renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program:

- a. Program peningkatan manajemen dan kepemimpinan Peradilan Militer;
- b. Program peningkatan area sumber daya manusia;
- c. Program peningkatan kebijakan peradilan dan proses pengadilan; dan
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana.

D. Struktur Organisasi

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur pemisahan Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sehingga dengan dikeluarkannya Perma tersebut tidak ada lagi rangkap jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menjadi sebagai berikut :

Kepaniteraan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Di samping organisasi struktural, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) dan Panitera Pengganti, serta jabatan fungsional di bagian kesekretariatan yaitu arsiparis, pustakawan, pranata komputer, dan bendahara.

1) Kelompok Hakim Militer

Kelompok Hakim Militer dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan Pelanggaran yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmil dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

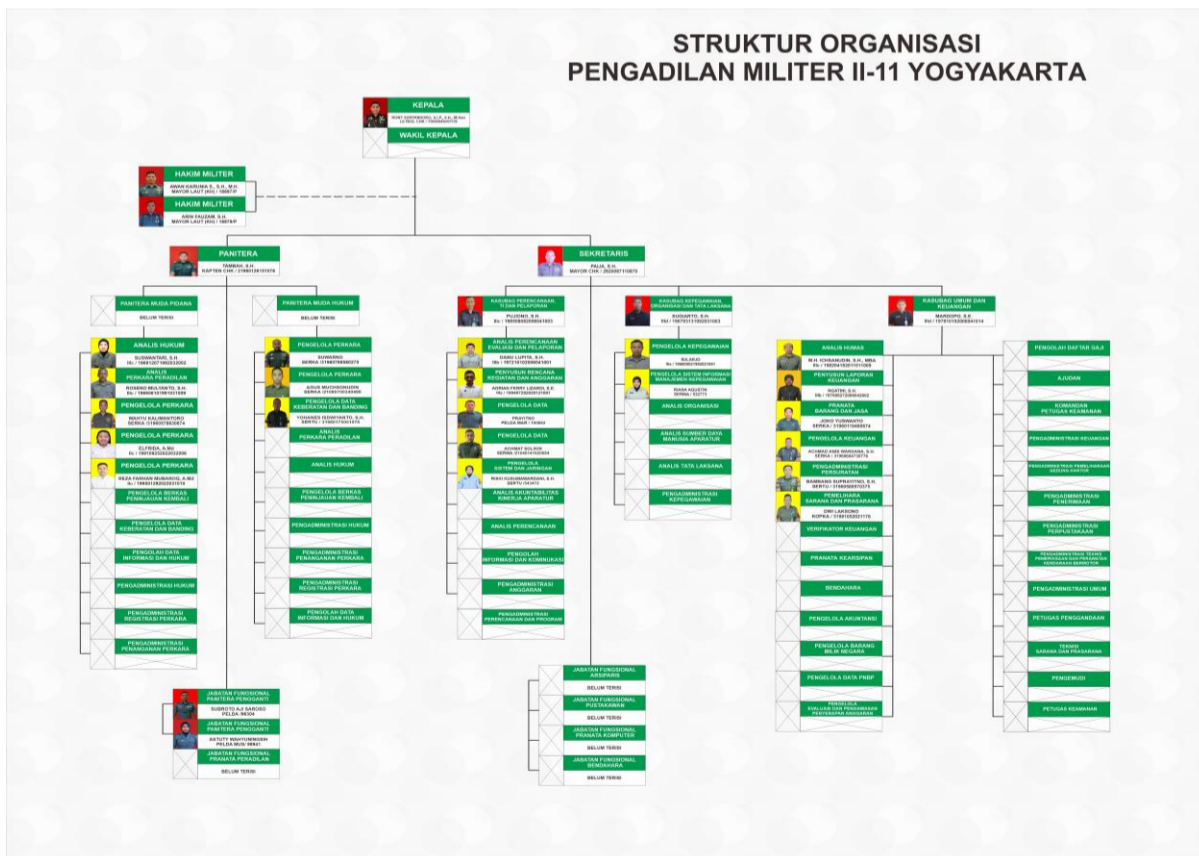
Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

2) Panitera Pengganti

Panitera pengganti merupakan petugas sidang yang bertugas menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim dalam persidangan untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang.

3) Fungsional Kesekretariatan

Jabatan fungsional pada bagian sekretariat antara lain pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer, adapun beberapa jabatan yang belum terisi sampai saat ini terlampir dalam struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.



BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku pengadilan Tingkat Pertama dalam Tahun 2022 telah menerima sebanyak 60 (enam puluh) perkara yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) perkara kejahatan dan 5 (lima) perkara pelanggaran lalu lintas. Dari 60 (enam puluh) Perkara tersebut terdiri dari beberapa klasifikasi Perkara sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Di kembalikan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
1	Pelanggaran lalu lintas	0	5	5	0	
2	Desersi	0	15	15	0	
3	Insubordinasi	0	2	2	0	
4	Kecelakaan Lalu lintas	0	3	3	0	
5	Mangkir	0	1	1	0	
6	Pelanggaran Asusila	0	7	7	0	
7	Pemalsuan Surat	0	1	1	0	
8	Pembunuhan	0	3	3	0	
9	Pemerasan	0	1	1	0	
10	Penadahan	0	2	2	0	
11	Pencurian	0	3	3	0	
12	Penganiayaan	0	9	9	0	
13	Penggelapan	0	2	2	0	
14	Penipuan	0	1	1	0	
15	Penyalahgunaan Wewenang	0	1	1	0	
16	Perzinahan	0	1	1	0	
17	Psikotropika	0	1	1	0	
18	Tidak Mentaati Perintah Dinas	0	1	1	0	
19	Lain-Lain (Penyembunyian Pelaku Kejahatan)	0	1	1	0	
Jumlah		0	60	60	0	

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Bahwa selama tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 19 (sembilan belas) perkara dengan rincian sebagai berikut :

1. Satriya Putra Pratama, S.T.Han., Lettu Kal / 542384, Kasubsidukmat Siminmat Subditlog Ditmin, Akademi Angkatan Udara;

2. Hastopo, Sertu / 31950446760974, Babinsaramil 17/Adimulyo, Kodim 0709/Kebumen (Desember);
3. M Rizwan Mohtar, Pratu / 31160680770797, Tabakpan 3 Rukamlap Raipur Bahwa, Yonarmed 3/105 Tarik /NP Kodam IV/Diponegoro.
4. Kholid Jalal Muhsin, Pratu / 31150425520694, Tamudi 2 Pokko Raipur B, Yonarmed 3/105 Tarik.
5. Ahmad Yusuf, Prada / 31190202991099, Tayanmer 4 Cukmer 4 Pokko Satbak Raipur B, Yon Armed 3/105 Tarik.
6. Sabar, Sertu/ 31960782441176, Bamin Tuud Ramil 07/Maos, Kodim 0703/Cilacap.
7. Eko Wahono, Serka/ 522122, Ba Sarban seksi angkutan Disops, Lanud Adisutjipto.
8. Joko Panuntun, Sertu/ 31010246631182, Baurmin Unit 1 Tim Intel, Korem 072/Pmk.
9. Ari Wahyu Sadewo, Sertu/ 21120056610292, Baur Ops Intel Siops, Den Intel Kodam IV/Diponegoro.
10. Azis Iriandi, Pratu/ 31160530460894, Ta Operator Recovery Truk Si Harpal Kibant, Denzipur 5/CMG Kodam XVI Pattimura.
11. Andreas Dwi Atmoko, Kopda/ 31081683800987, Tamudi Ramil 08/Ponjong, Kodim 0730/Gunung Kidul.
12. Achmad Sholeh, Koptu/ 31040664891185, Babinsa Ramil 08/Karang Amyar, Kodim 0716/Demak Rem 073/MKT.
13. Wowo Kartiwa, Peltu/ 21930067110774, Turmin Gud Satri Bekang, Akademi Militer.
14. Anggara Budi Wahana, Kopka/ 78754, Anggota Satkom Denma, Lantamal V Surabaya.
15. Alpin Mokoginta, Pratu/ 31180287150897, Ta Yonif Raider 400/BR, SMK Kesdam IV/ Diponegoro.
16. Andhi Kurniawan Gusti Utomo, Praka/ 31140144041293, Tabban Mudi Pokko SMB Kima (BP Penrem 071/Wk), Korem 071/Wk.
17. Heri Maulianda, Sertu/ 21160242540895, Bapal/Siwat/Ma, Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad.
18. Zainudin, Serka/ 31970221830875, Baton SLT/Bant, Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Purworejo.
19. Nanang Rofiek, Kopda/ 31100303880788, Tabak So Regu 3 Ton II Kmpi C, Yonif PR 501/BY/18/2 Kostrad.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Bahwa selama tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 14 (empat belas) perkara dengan rincian sebagai berikut :

1. Endri Sulistiyo, Koptu / 31040136970382, Tabak So Ru 3 Ton 2 Kidemlat, Rindam IV/Diponegoro;
2. Sodik, Serka / 31970145781077, Babinsa Koramil 12/Wadaslintang, Kodim 0707/Wonosobo;
3. Satriya Putra Pratama, S.T.Han., Lettu Kal / 542384, Kasubsidukmat Siminmat Subditlog Ditmin, Akademi Angkatan Udara.
4. Khasan, Kapten Arm/ 21940097631273, Pama Korem 071/Wijayakusuma, Korem 071/Wijayakusuma.
5. M Rizwan Mohtar, Pratu / 31160680770797, Tabakpan 3 Rukamlap Raipur Bahwa, Yonarmed 3/105 Tarik /NP Kodam IV/Diponegoro.
6. Kholid Jalal Muhsin, Pratu / 31150425520694, Tamudi 2 Pokko Raipur B, Yonarmed 3/105 Tarik, Kodam IV/Diponegoro.
7. Ahmad Yusuf, Prada / 31190202991099, Tayanmer 4 Cukmer 4 Pokko Satbak Raipur B, Yon Armed 3/105 Tarik, Kodam IV/Diponegoro.
8. Sabar, Sertu/ 31960782441176, Bamin Tuud Ramil 07/Maos, Kodim 0703/Cilacap.
9. Eko Wahono, Serka/ 522122, Ba Sarban seksi angkutan Disops, Lanud Adisutjipto.
10. Andreas Dwi Atmoko, Kopda/ 31081683800987, Tamudi Ramil 08/Ponjong, Kodim 0730/Gunung Kidul.
11. Achmad Sholeh, Koptu/ 31040664891185, Babinsa Ramil 08/Karang Amyar, Kodim 0716/Demak Rem 073/MKT.
12. Azis Iriandi, Pratu/ 31160530460894, Ta Operator Recovery Truk Si Harpal Kibant, Denzipur 5/CMG Kodam XVI Pattimura.
13. Jaenal Mustofa, Pratu/ 31150384360394, Ta Raipur B, Yonarmed 5/105 Tarik/Pancarigi.
14. Wowo Kartiwa, Peltu/ 21930067110774, Turmin Gud Satri Bekang, Akademi Militer.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Bahwa selama tahun 2022 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 1(satu) perkara adalah Suroto, Eks. Lettu Adm/ 516607, Eks. Ps Kaurpustakleksi Muspudirla, Dispenau.

5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi

Bahwa untuk upaya hukum Grasi selama tahun 2022 tidak ada/ nihil.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Bahwa perkara yang masuk pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2022 sejumlah 60 Perkara (55 Kejahatan, 5 Pelanggaran).

1. Jumlah Sisa perkara yang diputus

Bahwa sampai dengan akhir tahun 2022 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memutus seluruh perkara yang masuk yaitu sebanyak 60 (enam puluh) perkara.

2. Jumlah Perkara Putus tepat Waktu

Dari sejumlah 60 (enam puluh) Perkara yang telah diselesaikan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta semuanya diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tabel monitoring putusan Perkara sebagai berikut :

NO	BULAN	< 3 BULAN	4 - 5 BULAN	6 - 12 BULAN	> 12 BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	3	0	0	0	
2	FEBRUARI	4	0	0	0	
3	MARET	0	0	0	0	
4	APRIL	10	0	0	0	
5	MEI	4	0	0	0	
6	JUNI	1	0	0	0	
7	JULI	2	0	0	0	
8	AGUSTUS	10	0	0	0	
9	SEPTEMBER	3	0	0	0	
10	OKTOBER	1	0	0	0	
11	NOVEMBER	8	0	0	0	
12	DESEMBER	11	0	0	0	
JUMLAH		60	0	0	0	

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK).

Dari jumlah Perkara masuk dan yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat beberapa yang mengajukan Upaya Hukum (Banding dan Kasasi) sesuai tabel berikut :

Tabel keadaan perkara

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	2	3
1	Perkara kejahatan dan pelanggaran yang telah putus	60
2	Perkara yang mengajukan upaya hukum (Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali)	17
Total perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum		43

C. AKRDEDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mewujudkan visi-misi adalah dengan cara meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan militer secara prima dan optimal. Setiap upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik, indikator keberhasilannya haruslah terlebih dahulu diuji dengan berbagai persyaratan-persyaratan khusus yang harus memenuhi standarisasi dari kriteria yang ingin dicapai.

Setelah dinyatakan memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan khusus yang telah di standarisasi, Pengadilan militer II-11 Yogyakarta meraih Sertifikasi ISO 9001:2015. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*)”.

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan Manajemen Mutu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diadakannya Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penyelesaian perkara dilakukan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang diperuntukan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena alasan jarak, transportasi dan biaya serta faktor lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 40, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi :

- a. Pada Tingkat Pertama memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Memeriksa dan memutus Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan dari sidang keliling ke daerah adalah membantu, mempermudah, memperlancar proses pelayanan Hukum serta produk-produk Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang sangat luas serta hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara.

Oleh karena itu langkah yang ditempuh dalam proses percepatan penyelesaian perkara adalah dengan melakukan sidang keliling di tempat terjadinya tindak pidana dan yang terdekat dengan Kesatuan para Terdakwa dan para Saksi berada.

Bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan di kantor UPT Purwokerto dan Pengadilan Agama Magelang, Jawa Tengah sesuai dengan tabel dibawah ini:

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jml Perkara yang disidangkan	Jml Perkara yang diputus	Biaya	DIPA
1	2	3	4	5	6	7
1	24 s.d. 28 Januari 2022	UPT II-10 Purwokerto	5	3	Rp24.800.000	Rp24.800.000
2	22 s.d. 26 Agustus 2022	Pengadilan Agama Magelang	8	8	Rp18.200.000	Rp18.200.000

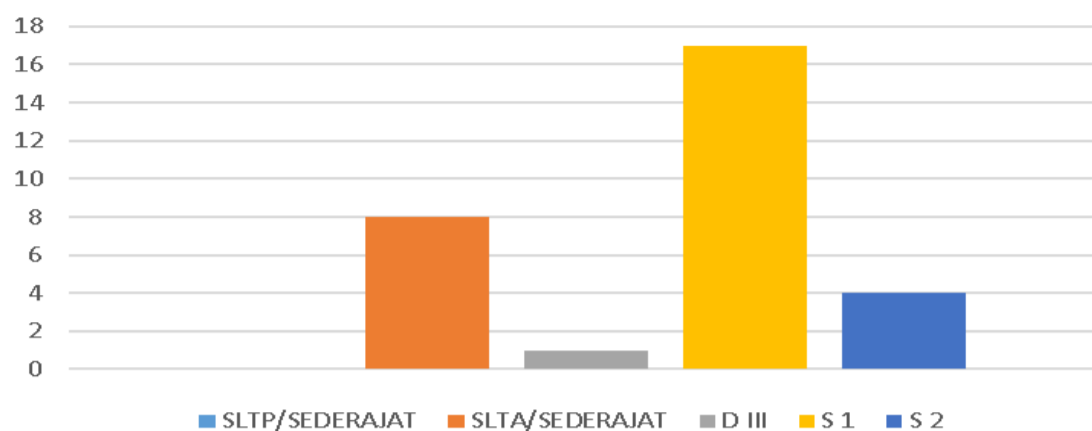
BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

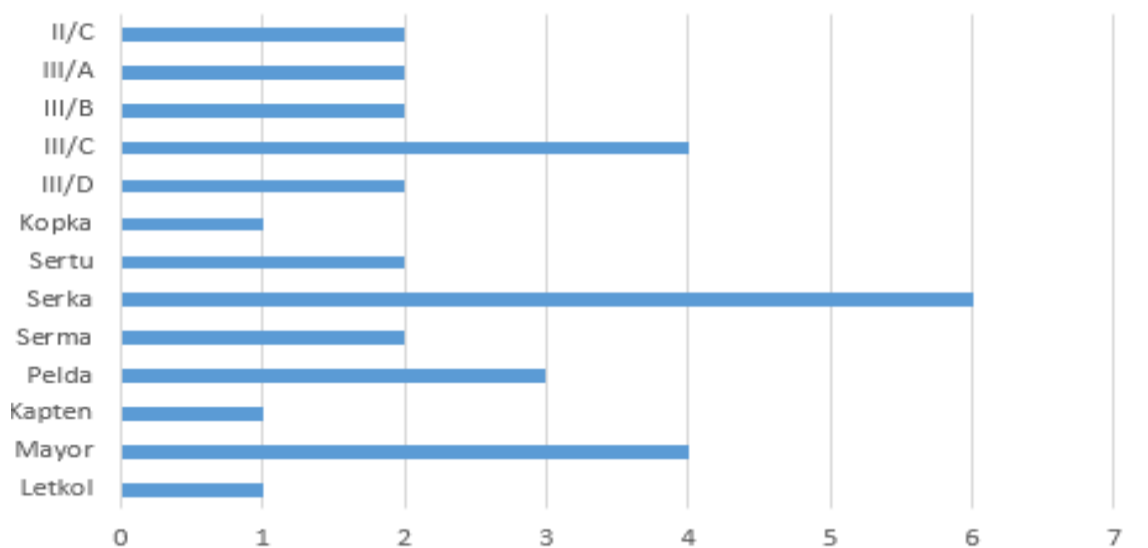
Pada Tahun 2022 personel Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berjumlah 32 (Tiga puluh dua) orang terdiri dari 20 (dua puluh) orang Militer dan 12 (sepuluh) orang ASN, masing-masing anggota menduduki jabatan sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT KORPS	NRP/NIP	JABATAN	MATRA	KET
1	2	3	4	5	6	7
PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA						
1	Rony Suryandoko, S.I.P.,S.H., M.Han.	Letkol Chk	11000045041178	Kadilmil	AD	Kimmil
2	Gatot Sumarjono, S.H., M.H.	Mayor Chk	11020006580974	Wakadilmil	AD	Kimmil
3	Arin Fauzam, S.H.	Mayor Laut (KH)	18879/P	Pokkimmil	AL	Kimmil
4	Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.	Mayor Laut (KH)	18897/P	Pokkimmil	AL	Kimmil
5	Tambah, S.H.	Kapten Chk	21980126151076	Panitera	AD	Panitera
6	Paija, S.H	Mayor Chk	2920087110870	Sekretaris	AD	Sekretaris
7	Subroto Aji Saroso, A.Md.	Pelda Ekl	96304	Panitera Pengganti	AL	PP
8	Astuty Wahyuningsih	Pelda Mus	98941	Panitera Pengganti	AL	PP
9	Prayitno	Pelda Mar	100662	Pengelola Data PTIP	AL	
10	Achmat Solikin	Serma	21040141920684	Pengelola Data PTIP	AD	
11	Riana Agustin	Serma	532773	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	AU	
12	Wahyu Kalimantanoro, S.H.	Serka	31960578830674	Pengelola Perkara Panmud Pidana	AD	
13	Joko Yuswanto	Serka	31960119480674	Pranata Barang dan Jasa	AD	
14	Achmad Andi Wardana	Serka	31960604730776	Pengelola Keuangan	AD	
15	Suwarno	Serka	31960769580275	Pengelola Perkara Panmud Hukum	AD	
16	Agus Muchsonudin	Serka	21080700340488	Pengelola Perkara Panmud Hukum	AD	
17	Yohanes Isdwiyanto, S.H.	Serka	31980175051078	Pengolah Data Keberatan dan Banding	AD	
18	Bambang Suprayitno, S.H.	Sertu	31960588570375	Pengadministrasi Persuratan	AD	
19	Riski Kusuma Wardani, S.H.	Sertu	543472	Pengelola Sistem dan Jaringan	AU	
20	Dwi Laksono	Kopka	31981052021176	Pemelihara Sarana dan Prasarana	AD	
21	Mardopo, S.E	Penata TK I	197810192006041014	Kasubag Umum dan Keuangan		
22	Sugiarto, S.H.	Penata TK I	196703131992031003	Kasubag Kepegawaian dan Ortala		
23	Pujiono, S.H.	Penata	19850808200604100	Kasubag PTIP		
24	M.H. Ichsanudin, S.H.,MBA	Penata	198204182011011009	Analisis Humas		
25	Suswantari, S.H.	Penata	196912071992032002	Analisis Hukum		
26	Roseno Mulyanto, S.H.	Penata	196606101991031009	Analisis Perkara Peradilan		
27	Ngatini, S.H.	Penata Muda Tk.I	197606272006042002	Penyusun Laporan Keuangan		
28	Danu Lupita, S.H	Penata Muda Tk.I	197210102006041001	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
29	Sularjo	Penata Muda	196905021992021001	Pengelola Kepegawaian		
30	Adrian Ferry Lizardi, S.E.	Penata Muda	199407282020121001	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran		
31	Reza Farhan Mubaroq, A.Md.	Pengatur	199501292022031010	Pengelola Perkara		
32	Elfrida, A.Md.	Pengatur	199109252022032006	Pengelola Perkara		

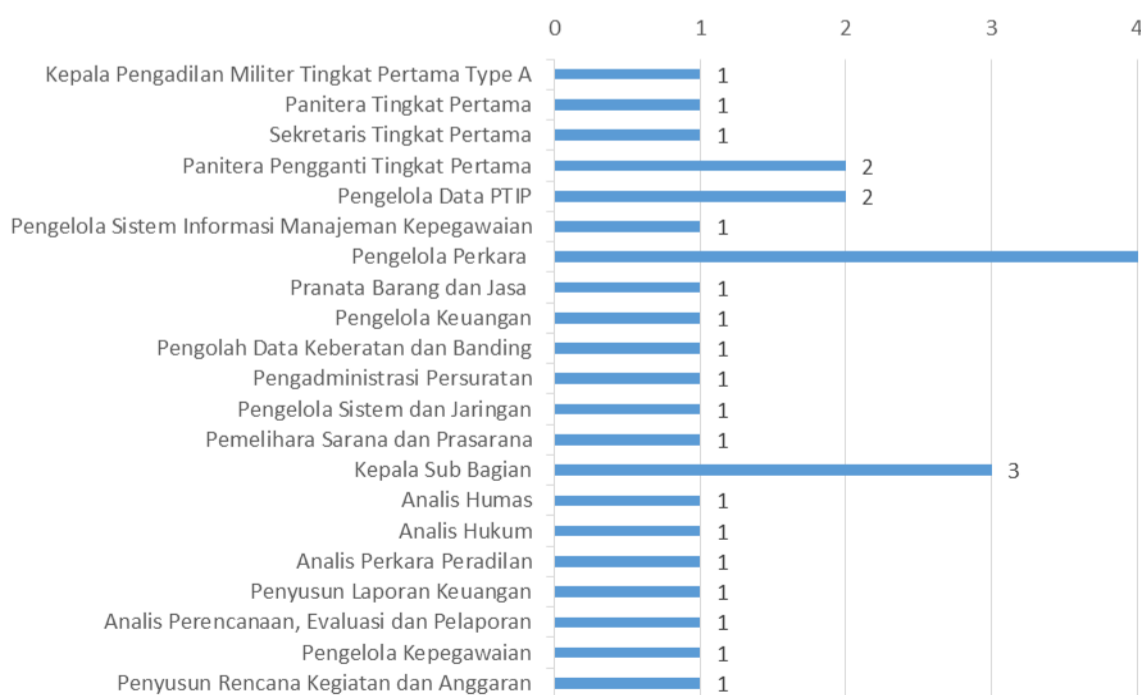
Grafik 1. Tingkat Pendidikan Pegawai pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



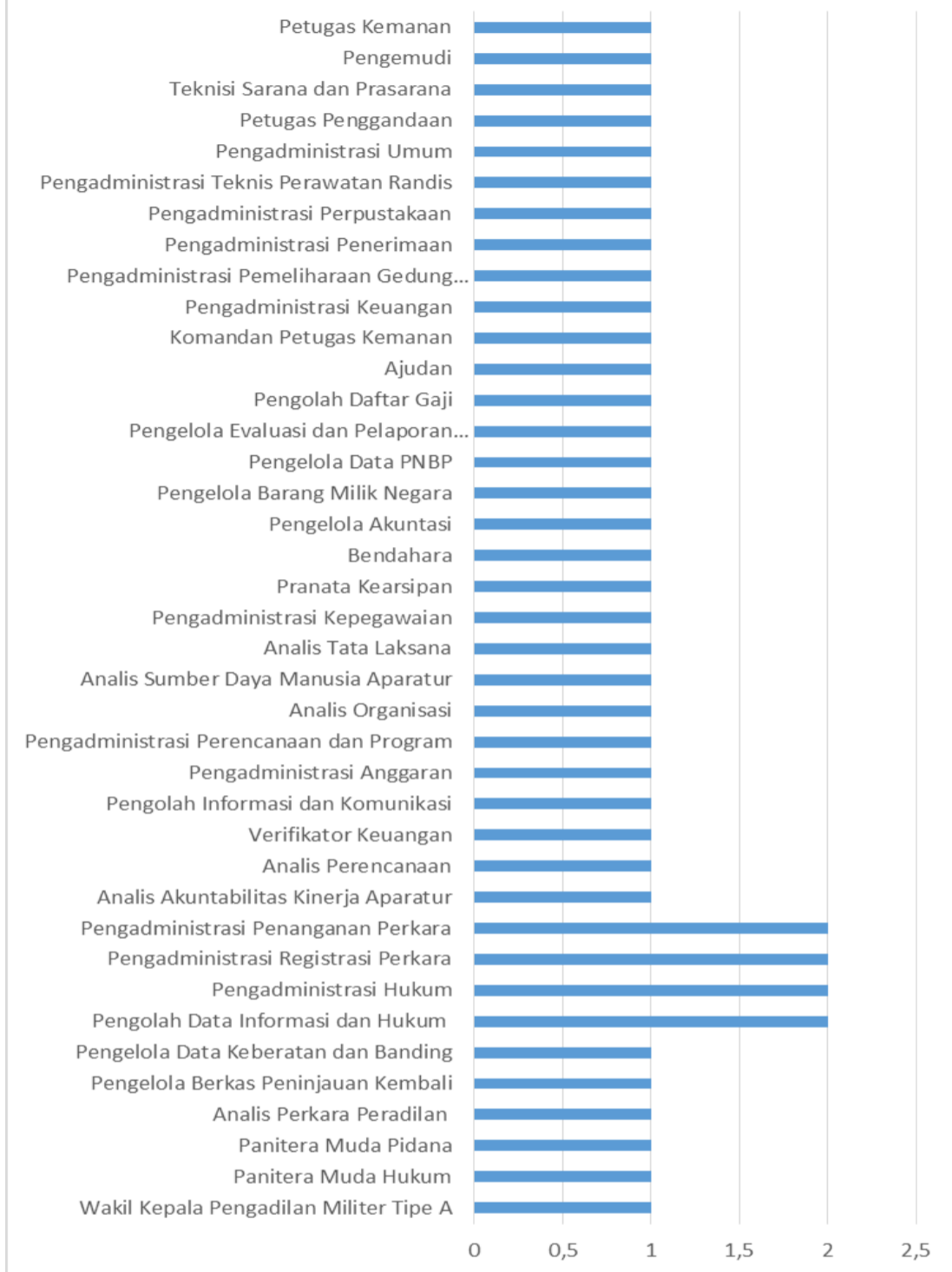
Grafik 2. Pangkat TNI dan PNS pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta



Grafik 3. Jabatan pada Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta



Grafik 4. Jabatan Yang Belum Terisi Pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



1. Mutasi

Mutasi atau pemindahan dapat berupa:

1. Mutasi dari satu tugas ke tugas lain yang sederajat (*Tour of duty*).
2. Mutasi dari satu daerah ke daerah lain dengan tugas yang sama (*Tour of area*).
3. Kombinasi antara a dan b

Selama tahun 2022 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ada beberapa Personel yang telah mengalami Mutasi antara lain:

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	SPRIN	KET
				JABATAN LAMA JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1.	Patta Imang, S.H.	Mayor Chk 21930123471271	W2-Mil04/12/Sprin/II/2022	Pokkimmil Dilmil II-11 Pokkimmil Dilmil III-17
2.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Letkol Chk 11010047011279	W2-Mil04/49/Sprin/VII/2022	Kadilmil II-11 Wakadilmil II-08
3.	Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H.	Mayor Chk 11020006580974	W2-Mil04/52/Sprin/VII/2022	Wakadilmil II-11 Pokkimmil III-19
4	Muhammad Rizal, S.H., M.H.	Letkol Chk 11010047011279	W2-Mil04/103/Sprin/XII/2022	Kadilmil II-11 Pokkimmil II-08
5	Gatot Sumarjono, S.H., M.H.	Mayor Chk 11020006580974	W2-Mil04/103/Sprin/XII/2022	Wakadilmil II-11 Pokkimmil II-08
6	Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.	Letkol Chk 11000045041178	Miltama/Sprin/564/KP.04.6/XII/2022	Wakadilmil III-12 Kadilmil II-11

2. Promosi.

Pada dasarnya untuk suatu jabatan struktural ditetapkan satu pangkat pejabat yang dipercayakan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi berarti suatu promosi/kenaikan. Pada tahun 2022 Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut beberapa Jabatan Struktural sudah terisi, namun ada jabatan Struktural yang belum terisi yaitu Panitera Muda Hukum.

Selama tahun 2022 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta beberapa personel yang mengalami promosi antara lain:

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	SURAT TUGAS/ SPRIN	KET
				JABATAN LAMA JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1.	Astuty Wahyuningsih	Pelda Mus 98941	W2-Mil04/05a/Sprin/I/2022	Pengelola Berkas PK Panitera Pengganti
2.	Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.	Mayor Laut (KH) 18897/P	W2-Mil04/12/Sprin/II/2022	Pokkimmil Dilmil I-06 Pokkimmil Dilmil II-11
3.	Prayitno	Pelda Mar 100662	W2-Mil04/24a/Sprin/IV/2022	Pengelola Data Ditjen Badilmiltun Pengelola Data Dilmil II-11
4.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Letkol Chk 11010047011279	W2-Mil04/49/Sprin/VII/2022	Kadilmil II-11 Wakadilmil II-08
5.	Muhammad Rizal, S.H., M.H.	Letkol Chk 11010014160477	Sprin/260/KP.04.6/VII/2022	Pokkimmil I-02 Kadilmil II-11

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	SURAT TUGAS/ SPRIN	KET
				JABATAN LAMA JABATAN BARU
1	2	3	4	5
6.	Gatot Sumarjono, S.H., M.H.	Mayor Chk 11040011581080	W2-Mil04/53/Sprin/VII/2022	Pokkimit I-07 Wakadilmil II-11
7.	Tambah, S.H	Kapten Chk 21980126151076	W2-Mil04/53/Sprin/VII/2022	Panmud Hukum Dilmil II-11 Panitera Dilmil II-11

3. Pensiun.

Nihil.

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).

Pada tahun 2022 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mengirimkan Hakim, Panitera dan ASN yang telah mengikuti pelatihan maupun seminar Teknis Yudisial antara lain :

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	NO SPRIN/ RATGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.H.	Letkol Chk 11010047011279	W2-Mil04/01/Sprin/I/2022	Pelatihan <i>Champion Meeting-Court Exelience Training</i>
2	Subroto Aji Saroso, A.Md	Pelda 96304	W2-Mil04/09/Sprin/I/2022	Bimbingan Teknis Kepaniteraan
3.	Astuty Wahyuningsih	Pelda Mus 98941	W2-Mil04/09/Sprin/I/2022	Bimbingan Teknis Kepaniteraan
4.	Tambah, S.H.	Kapten Chk 21980126151076	W2- Mil04/18/Sprin/III/2022	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti
5.	Subroto Aji Saroso, A.Md	Pelda 96304	W2- Mil04/18/Sprin/III/2022	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti
6.	Astuty Wahyuningsih	Pelda Mus 98941	W2- Mil04/18/Sprin/III/2022	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti
7.	Mardopo, S.E.	Penata Tk. I 197210192006041014	W2- Mil04/19/Sprin/III/2022	Pelaksanaan Kegiatan <i>Mobile Service Area</i>
8.	Ngatini, S.H.	Penata Muda Tk. I 197606272006042002	W2- Mil04/19/Sprin/III/2022	Pelaksanaan Kegiatan <i>Mobile Service Area</i>
9.	Arin Fauzam, S.H.	Mayor Laut (KH) 18879/P	W2- Mil04/20/Sprin/III/2022	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim
10.	Astuty Wahyuningsih	Pelda Mus 98941	W2- Mil04/30/Sprin/V/2022	Bimtek Panitera/Panitera Pengganti
11.	Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.	Mayor Laut (KH) 18897/P	W2- Mil04/31/Sprin/V/2022	Bimtek Administrasi SIPP
12.	Prayitno	Pelda Mar 100662	W2- Mil04/31/Sprin/V/2022	Bimtek Administrasi SIPP

NO	NAMA	PANGKAT/NRP/ NIP	NO SPRIN/ RATGAS	KET
1	2	3	4	5
13.	Astuty Wahyuningsih	Pelda Mus 98941	W2- Mil04/36/Sprin/V/2022	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama
14.	Prayitno	Pelda Mar 100662	W2- Mil04/36/Sprin/V/2022	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama
15.	Mardopo, S.E.	Penata Tk. I 197210192006041014	W2- Mil04/37/Sprin/VI/2022	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Penatausahaan BMN
16.	M.H. Ichsanudin, S.H., MBA.	Penata 198204182011011009	W2- Mil04/37/Sprin/VI/2022	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Penatausahaan BMN
17.	Adrian Ferry Lizardi, S.E.	CPNS 199407282020121001	W2- Mil04/38/Sprin/VI/2022	Bimbingan Teknis Kewajiban Perpajakan
18.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.H.	Letkol Chk 11010047011279	W2- Mil04/41/Sprin/VI/2022	Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum dan Modul Program Pendidikan
19.	Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.	Mayor Laut (KH) 18897/P	W2- Mil04/43/Sprin/VI/2022	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim
20.	Muhammad Rizal, S.H., M.H.	Letkol Chk 11010014160477	W2- Mil04/43/Sprin/VIII/2022	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter
21.	Tambah, S.H.	Kapten Chk 21980126151076	W2- Mil04/65/Sprin/VIII/2022	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama
22.	Reza Farhan Mubaroq, A.Md.	CPNS 199501292022031010	W2- Mil04/65/Sprin/VIII/2022	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama
23.	Paija, S.H.	Mayor Chl 2920087110870	W2- Mil04/66/Sprin/VIII/2022	Bimbingan Teknis Kesekretariatan
24.	Sugiarto, S.H.	Penata Tk. I 196703131992031003	W2- Mil04/66/Sprin/VIII/2022	Bimbingan Teknis Kesekretariatan
25.	Tambah, S.H.	Kapten Chk 21980126151076	W2- Mil04/70/Sprin/VIII/2022	Bimtek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer
26.	Adrian Ferry Lizardi, S.E.	Penata Muda 199407282020121001	W2- Mil04/72/Sprin/VIII/2022	Pembelajaran <i>E- Learning</i> Bendahara Pengeluaran
27.	Mardopo, S.E.	Penata Tk. I 197210192006041014	W2- Mil04/80/Sprin/X/2022	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan
28.	Adrian Ferry Lizardi, S.E.	Penata Muda 199407282020121001	W2- Mil04/80/Sprin/X/2022	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan
29.	Ngatini, S.H.	Penata Muda Tk. I 197606272006042002	W2- Mil04/94/Sprin/XI/2022	Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran
30.	Astuty Wahyuningsih	Pelda Mus 98941	W2- Mil04/99/Sprin/XI/2022	Kegiatan Standarisasi Tenaga Teknis
31.	Prayitno	Pelda Mar 100662	W2- Mil04/99/Sprin/XI/2022	Kegiatan Standarisasi Tenaga Teknis
32.	Muhammad Rizal, S.H., M.H.	Letkol Chk 11010014160477	W2- Mil04/100/Sprin/XI/2022	Bimtek <i>Accessor</i> di Lingkungan Peradilan Militer

BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

1. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663292) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai :

- Pagu	Rp 2.137.245.000,-
- Realisasi	Rp 1.815.452.044,-
- Sisa	Rp. 321.792.956,-
Prosentase	88,94 %

b) Belanja Barang Operasional

- Pagu	Rp 1.333.431.000,-
- Realisasi	Rp 1.270.272.904,-
- Sisa	Rp 62.703.096,-
Prosentase	97,64 %

c) Belanja Modal

- Pagu	Rp 415.600.000,-
- Realisasi	Rp 334.593.000,-
- Sisa	Rp 81.007.000,-
Prosentase	80,51 %

2. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663293) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Barang Operasional

- Pagu	Rp 83.000.000,-
- Realisasi	Rp 80.092.300,-
- Sisa	Rp 2.907.700,-
Prosentase	96,49 %

b) Belanja Barang Non Operasional

- Pagu	Rp.	-
- Realisasi	Rp.	-
- Sisa	Rp.	-

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang beralamat di Jl. Majapahit Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta dibangun di atas tanah seluas ± 2.640 M² dan luas bangunan seluas 1.672 M² yang telah bersertifikat atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI.

Adapun data Aset tanah dan bangunan Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut :

a. Keadaan Gedung

Tabel : Ruangan Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Ruangan Kantor	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala	1 Ruang	Kondisi Baik
2.	Ruang Wakil Kepala	1 Ruang	Kondisi Baik
3.	Ruang Hakim	2 Ruang	Kondisi Baik
4.	Ruang Panitera	1 Ruang	Kondisi Baik
5.	Ruang Sekretaris	1 Ruang	Kondisi Baik
6.	Ruang Sidang Umum	2 Ruang	Kondisi Baik
7.	Ruang Kepaniteraan Muda Pidana	1 Ruang	Kondisi Baik
8.	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1 Ruang	Kondisi Baik
9.	Ruang Panitera Pengganti	1 Ruang	Kondisi Baik
10.	Ruang Sub Bag. Umum dan Keuangan	1 Ruang	Kondisi Baik
11.	Ruang Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala	1 Ruang	Kondisi Baik
12.	Ruang Sub Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Ruang	Kondisi Baik
13.	Ruang Server dan TI	1 Ruang	Kondisi Baik
14.	Ruang Arsip Perkara	1 Ruang	Kondisi Baik
15.	Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Kondisi Baik
16.	Ruang Tamu Terbuka	1 Ruang	Kondisi Baik
17.	Ruang Rapat Pimpinan/Comand Center	1 Ruang	Kondisi Baik
18.	Ruang Saksi	1 Ruang	Kondisi Baik
19.	Ruang Kesehatan/Laktasi	1 Ruang	Kondisi Baik
20.	Ruang Oditur Militer/Polisi Militer	1 Ruang	Kondisi Baik
21.	Ruang Penasehat Hukum	1 Ruang	Kondisi Baik
22.	Ruang Mushola	1 Ruang	Kondisi Baik

b. Fasilitas Perkantoran

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Ketik Manual	1	1			
2	Mesin Ketik Elektrik	1	1			
3	Lemari Besi/Metal	13	13			
4	Lemari Kayu	8	8			
5	Rak Kayu	5	5			
6	Filling Cabinet Besi	10	10			
7	Filling Cabinet Kayu	19	19			
8	Brandkas	2	2			
9	Buffet	9	9			

10	Mobil File	2	2			
11	CCTV	10	10			
12	Movitex Board	1	1			
13	Alat Penghancur Kertas	3	3			
14	Mesin Absensi	2	2			
15	Alat Pemotong Kertas	1	1			
16	Mesin Laminating	1	1			
17	LCD Projector/Infocus	2	2			
18	Papan Pengumuman	1	1			
19	Meja Kerja Kayu	50	50			
20	Kursi Besi/Metal	316	316			
21	Kursi Kayu	18	18			
22	Sice	14	14			
23	Bangku Panjang Kayu	17	17			
24	Meja Komputer	9	9			
25	Tempat Tidur Kayu	3	3			
26	Sketsel	2	2			
27	Meja Resepsionis	1	1			
28	Kasur/Spring Bed	2	2			
29	Backdrop TV/Wardrobe	2	2			
30	Gantungan Jas	6	6			
31	Nakas	2	2			
32	Meubelair Lainnya	58	58			
33	Jam Mekanis	22	22			
34	Kipas Angin	2	1		1	
35	Kitchen Set	1	1			
36	A.C. Split	20	20			
37	Alat Dapur Lainnya	2	2			
38	Televisi	7	7			
39	Loudspeaker	3	3			
40	Sound System	1	1			
41	Karaoke	1	1			
42	Wireless	1	1			
43	Microphone	1	1			
44	Mic Conference	5	5			
45	Unit Power Supply	26	22		4	
46	Stabilisator	1	1			
47	Tustel	1	1			
48	Lambang Garuda Pancasila	4	4			
49	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	4	4			
50	Tiang bendera	8	8			
51	Tangga Alumunium	2	2			
51	Dispenser	5	5			
52	Lambang Instansi	1	1			
53	Karpet	13	13			
54	Handy Cam	1	1			
55	Vertikal Blind	64	64			
56	Kabel Rol	1	1			
57	Alat Rumah tangga Lainnya	61	61			
58	Panggung	2	2			
59	Microphone/Boom Stand	1	1			
60	Pesawat Telephone	15	15			
61	Facsimile	2	2			
62	Tripod	1	1			
63	Internet	1	1			
64	Komputer Jaringan Lainnya	1	1			
65	PC Unit	38	34		4	
66	Laptop	22	21		1	
67	Printer (Peralatan PC)	31	31			
68	Scanner (Peralatan PC)	3	3			
69	Server	4	4			
70	Router	4	4			
71	Rak Server	1	1			

c. Kendaraan Dinas

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Kondisi (unit)			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus Toyota Inova	2019	√			Pihak Ketiga
2	Minibus Toyota Inova	2008		√		
3	Minibus Toyota Inova	2011	√			
4	Minibus Toyota Avanza		v			Hibah dari Ditjen Badilmiltun MARI
	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Supra x 125	2006	√			
2	Honda Supra x 125	2007	√			
3	Honda Supra x 125	2008	√			
4.	Honda Mega Pro	2008	√			
5.	Honda GL Max	2006		√		

d. Rumah Dinas

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai Rumah dinas untuk Kepala, Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris.

e. Tanah

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memiliki sebidang tanah seluas 1.250 M² yang direncanakan untuk pembangunan rumah dinas, perolehan tahun 2011, dimana sampai saat ini masih belum termanfaatkan karena keterbatasan anggaran.

2. Pengadaan

Mahkamah Agung RI merupakan suatu Lembaga Negara yang mempunyai visi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, berdasarkan *Road Map* dan *Grand Desain* reformasi birokrasi Mahkamah Agung salah satunya dengan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana

pembangunan gedung kantor *Prototype* sebagai wujud pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Salah satu faktor pendukung kelancaran tugas pada suatu lembaga dan merupakan suatu syarat yang sangat penting adalah sarana dan prasarana / fasilitas gedung beserta kelengkapannya. Tahun Anggaran 2022 terdapat alokasi dana pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Adapun rincian pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel : Pengadaan sarana dan prasaranan Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Paket Pekerjaan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer)	Rp10.000.000,-	Rp10.000.000,-	Sudah dilaksanakan
2	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan (Pembangunan Pagar)	Rp405.000.000,-	Rp324.583.000,-	Sudah dilaksanakan

3. Pemeliharaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengelolaan Aset Negara, bahwa aset Negara harus dikelola, dirawat dan dipelihara dengan baik, dengan efektifitas dan efisien pada penggunaannya. Penggunaan sarana dan prasarana fasilitas gedung hendaknya tetap terjaga serta terpelihara dengan baik supaya peruntukan dan penggunaannya serta pemanfaatannya benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk tahun anggaran 2021 pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Gedung Bangunan.

Untuk kegiatan pemeliharaan gedung pada TA 2021 telah dilaksanakan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut:

Tabel : Perawatan/pemeliharaan gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Paket Pekerjaan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Perawatan Gedung dan Bangunan	Rp209.560.000,-	Rp209.398.832,-	Sudah dilaksanakan

b. Peralatan dan mesin.

Untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin pada TA 2021 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel : Perawatan/pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Jenis pemeliharaan	Jml	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	
1.	Kendaraan dinas roda 4	4	Rp103.232.000	Rp98.402.000	Rp4.830.000
2.	Kendaraan dnas roda 2	5	Rp15.640.000	Rp15.640.000	Rp0
3.	AC Split	14	Rp20.310.000	Rp20.063.801	Rp246.199
4.	PC dan Laptop	30	Rp24.100.000	Rp23.750.000	Rp350.000
5.	Genset	1	Rp4.900.000	Rp4.900.000	Rp0
6.	Printer	30	Rp11.800.000	Rp6.500.000	Rp5.300.000
7.	CCTV	8	Rp4.500.000	Rp3.932.500	Rp567.500
8.	Server	2	Rp700.000	Rp0	Rp700.000
9.	Bahan bakar	1	Rp400.000	Rp400.000	Rp0
Jumlah			Rp185.582.000	Rp173.588.301	Rp11.993.699

4. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.

Bahwa di tahun 2022 tepatnya pada bulan Agustus Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan proses pelelangan terhadap Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat, sampai dengan saat ini masih menunggu administrasi/dokumen persetujuan penghapusan dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi *e-court* di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,

seluruh badan peradilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib menggunakan *e-court*.

Akan tetapi sesuai Bab I Pasal 1 ayat 5 Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya mengatur tentang Tata Usaha Militer, sedangkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum pernah memeriksa perkara tentang Tata Usaha Militer atau hanya memeriksa dan memutus perkara pidana (Kejahatan dan Pelanggaran Lalu lintas).

Guna mendukung Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah membuat sebuah aplikasi berbasis TI yang bernama SIPPINTTER (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu) yang telah diresmikan oleh Dirjen Badilmiltun MARI pada tanggal 19 Februari 2019 dan sesuai perintah Dirjen Badilmiltun MARI diberlakukan kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam kapasitasnya selaku pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer seluruh Indonesia berdasarkan Surat Edaran Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 14/DjMT/SE/6/2019 tanggal 12 Juni 2019.

Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu (Sippintter) ini telah disosialisasikan ke satuan mitra kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam hal ini mulai dari tingkat POM (Polisi Militer), Oditurat Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Proses bisnis aplikasi SIPPINTTER ini adalah pendaftaran perkara secara elektronik, dimana pelimpahan berkas perkara dari POM (Polisi Militer) kepada Oditurat Militer cukup diunggah ke aplikasi, setelah dikirim akan muncul *barcode*, kemudian *barcode* tersebut yang di kirim ke Oditurat Militer, begitu seterusnya sampai ke Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengembangan aplikasi tersebut dengan menambahkan menu atau fitur yaitu *user* untuk para komandan satuan dengan harapan dengan penambahan menu atau fitur tersebut para komandan satuan mampu memonitor jalannya perkara yang sedang di hadapi oleh anggotanya.

Akan tetapi aplikasi ini belum sempurna, dikarenakan server Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum bisa menampung seluruh administrasi berkas perkara, maka untuk sementara yang di *upload* hanya surat dakwaan dan sebagainya.

2. Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yaitu SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah *web* atau yang dikenal sebagai *browser* melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua staf pengadilan dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 bahwasanya setiap elemen tugas dan staf dipengadilan wajib menggunakan aplikasi SIPP dalam memproses pencatatan administrasi perkara dipengadilan. Setiap pengguna memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing posisi. Setiap staff pengadilan wajib memiliki satu *username* dan *password* yang dapat digunakan untuk *login* atau validasi untuk dapat masuk kedalam aplikasi SIPP.

Terkait dengan pelayanan publik kemudian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI meluncurkan program Layanan Informasi “*One Day Publish*”. Program “*One Day Publish*” adalah pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selanjutnya Satker di bawah Mahkamah Agung RI yang telah mengimplementasikan SIPP, dituntut untuk memberikan pelayanan publik berupa “*One Day One Publish*”.

“*One Day One Publish*” merupakan maklumat pelayanan kepada publik, bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga akan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke Terdakwa, Ankum, Papera, Penyidik, Otmil dan Kesatuan.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna layanan ini, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan memuat informasi perkara di laman *website* resmi www.dilmil-yogyakarta.go.id dan SIPP *Web* Satker Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sipp.dilmil-yogyakarta.go.id pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Dimana masyarakat pencari keadilan bisa mengakses langsung pada laman resmi tersebut.

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memperbaharui dan mengembangkan websit menjadi lebih milenial untuk menjawab perkembangan teknologi informasi saat ini dengan menambahkan fitur-fitur layanan dan informasi yang memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dengan menyajikan PTSJ (Pelayanan Terpadu Satu Jendela), dimana dengan hanya membuka 1 (satu) halaman *website* maka telah dapat tersaji seluruh layanan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. Pencapaian Prestasi Pembangunan Zona Integritas

Bahwa penancangan zona integritas pada pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai pada tahun 2017. Berawal dari penancangan zona integritas tersebut Kadilmil II-11 Yogyakarta beserta seluruh anggota berkomitmen untuk meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dengan cara membangun sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta demi meningkatkan kinerja.

Puncaknya pada tahun 2022 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil melakukan pembangunan zona integritas melalui 6 (enam) area perubahan secara komprehensif, dimana atas kerja keras itu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil lolos dalam penilaian oleh Tim evaluator internal maupun eksternal dan dinyatakan sebagai salah satu satker yang berhasil meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi (*Acreditation*) merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Penjaminan Mutu adalah serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi penjaminan mutu *Indonesia Court Performance Excellence* (ICPE) merupakan ISO *plus*. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellence* (IFCE), pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badilmiltun MARI.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agung, bersih dan memiliki pelayanan prima sesuai tujuan *blue print* Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035.

Kriteria Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu terdiri dari 7 (tujuh) area yaitu :

- 1) Area-1 Kepemimpinan
- 2) Area-2 Bindalmil dan SOP (*Standar Operational Procedure*)
- 3) Area-3 Sarana dan Prasarana
- 4) Area-4 *E-Judiciary*
- 5) Area-5 Layanan Pengadilan
- 6) Area-6 Sumber Daya Manusia (SDM)
- 7) Area-7 Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Ditbinganismil yang telah dinilai oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memperoleh nilai total akreditasi 96,61 (sembilan puluh enam koma enam puluh satu) dengan predikat **EXCELLENT**.

Bahwa pada tahun 2020 ini telah dilaksanakan *Surveillance* Akreditasi oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kembali dapat mempertahankan predikat “A” **EXCELLENT**.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik.

Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik seluruh peradilan militer termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempedomani Keputusan Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 460/DjMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standart Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Maksud dan tujuan PTSP yaitu untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada masyarakat yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk diketahui bahwa dalam PTSP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat 4 (empat) meja pelayanan yaitu meja kesekretariatan, meja kepaniteraan, meja pengaduan dan meja informasi. Diharapkan dengan adanya PTSP ini masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang cepat tanpa harus bersinggungan dengan petugas lainnya selain petugas PTSP sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek-praktek yang bersifat Koruptif.

Berdasarkan penilaian dari Ditjen Badilmiltun MARI mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendapat Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 05-MIL / DJMT / PTSP / SERTIFIKAT / 09 / 2018 berpredikat Juara Harapan II.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik, pimpinan Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada seluruh badan Peradilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk berinovasi dalam segala aspek pelayanan.

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2020 telah membuat beberapa inovasi antara lain sebagai berikut :

1. Aplikasi SIPPINTTER (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu)
2. Aplikasi Persuratan
3. Aplikasi E-Servis
4. Aplikasi Asyiap
5. Aplikasi Barcode Dilmil
6. Aplikasi Survey (IKM dan IPK)
7. Pemutahiran Website
8. Zonanisasi dan Sekatisasi
9. E- Catalog
10. CCTV ruang sidang yang terintegrasi dengan website Dilmil II-11 Yogyakarta
11. Pesan Dilan (Petikan Putusan Pengadilan)
12. Lisan Sikode (Salinan Putusan Berbasis kode QR)

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam hal pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, disamping itu pula berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Dirjen Badilmiltun serta Kadilmiltama.

Tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional bidang masing-masing :

- 1) Hakim Pengawas Bidang Kedisiplinan Hakim dan Pegawai.
- 2) Hakim Pengawas Bidang Informasi dan Pelayanan Publik.
- 3) Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- 4) Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.
- 5) Hakim Pengawas Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 6) Hakim Pengawas Administrasi Perkara.

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai Hakim pengawas terhadap para hakim yang berada di bawah pengawasan

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial. Kadilmil II-11 Yogyakarta juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.

Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan staf serta dilaporkan kepada Kadilmil.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan langsung, pada setiap hari Senin minggu pertama setiap bulan diadakan jam Komandan/*briefing* oleh Kepala Pengadilan dengan tujuan memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas dan disiplin kerja agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna. Serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan.

Demi tertibnya administrasi perkara, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan minutasasi penjilidan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan Petikan Putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang setiap Triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik (*vide* Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997) sedangkan himpunan petikan putusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun, Dilmiltama dan Dilmilti II Jakarta pada kesempatan pertama. Sedangkan untuk tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tujuan diadakannya pengawasan dan pembinaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah :

- a) Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna;
- b) Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;

- c) Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;
- d) Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait;
- e) Berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.
- f) Menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;
- g) Menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;
- h) Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus; dan
- i) Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

B. EVALUASI

Sesuai dengan pedoman pengawasan maka pada pengawasan regular ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan dan administrasi perkara;
2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, Perencanaan, Pelaporan dan administrasi umum lainnya; dan
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik khususnya pada satuan-satuan militer yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2022 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta hingga saat ini sudah menggunakan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
2. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer.
3. Penyelesaian perkara dalam tahun 2022 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara kejahatan sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara, dan perkara pelanggaran yang putus sebanyak 5 (lima) perkara, dengan 0 (Nol) sisa perkara.
4. Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan tertib walaupun masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan.
5. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi dengan adanya inovasi-inovasi pelayan publik.
6. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.
7. Personel Dilmil II-11 Yogyakarta sampai saat ini baik Militer maupun ASN masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban sesuai dengan jumlah perkara yang ada, terutama untuk komposisi Hakim dan Panitera Pengganti serta jabatan lain sebagaimana nomenklatur pada surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor 907/SEK/KP.01.2/6/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana.

8. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2022 telah mengalami peningkatan Kelas Pengadilan dari Tipe B menjadi Tipe A.

9. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2022 telah meraih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayaaugunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

10. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai rumah dinas bagi pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-11 Yogyakarta.

11. Hambatan.

Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

a) Personel.

Personel satuan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta masih sangat kurang karena setiap tahun ada Personel yang mutasi, terutama pada personel Militer dimana jumlah yang keluar selalu lebih banyak dari pada personel yang masuk satuan, sehingga perlu penambahan personel baik Militer maupun ASN.

b) Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum terisi, sehingga untuk tugas dan tanggung jawab di berikan kepada Plt. Panitera Muda Pidana yaitu Pelda Mus Astuty Wahyuningsih.

b) Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum terisi, sehingga untuk tugas dan tanggung jawab di berikan kepada Plt.Panitera Muda Hukum yaitu Pelda Ekl Subroto Aji Saroso.

c) Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga uraian tugas dan tanggungjawab organisasi telah

seragam dengan Pengadilan lingkungan pengadilan lain yang satu atap dengan MARI.

Untuk pengembangan karir ASN sangat sulit karena terbatasnya jabatan yang bisa diduduki oleh ASN, karena beberapa jabatan tersebut mensyaratkan hanya untuk personel Militer, ruang jabatan juga mensyaratkan pada golongan dan syarat pendidikan.

12. Solusi.

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2022 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan tugas dan kewenangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.

Hal tersebut tentunya dengan melihat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu.

B. Rekomendasi

1. Untuk Meningkatkan Kinerja dan disiplin bagi pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, perlu terus ditingkatkan pengawasan, baik secara struktur oleh atasan langsung maupun secara fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk keperluan pemeliharaan baik gedung maupun fasilitas gedung tersebut serta anggaran untuk pembangunan mess pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
3. Guna mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, mohon penambahan tenaga fungsional Hakim Militer, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda hukum

dan ASN yaitu Tenaga IT serta Komputer berkualifikasi Diploma III atau Sarjana Teknik Informatika/Teknik Komputer/Sistem Informasi.

4. Mohon penambahan anggaran terkait pembangunan rumah dinas bagi pejabat Pejabat Struktural, Hakim, dan Panitera Pengganti.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 yang kami susun sebagai pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran 2022 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dengan berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon satuan atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.

Yogyakarta, Desember 2022

Kepala Pengadilan Militer II-11,

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178